

DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN

AIR LIMBAH (IPAL) KEPADA MASYARAKAT

(Studi Kasus Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul)



DISUSUN OLEH :

**DAVID RAHMAD MULYANA**

19520002

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN  
AIR LIMBAH (IPAL) KEPADA MASYARAKAT  
(Studi Kasus Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten  
Gunungkidul)**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :




Hari : Selasa

Tanggal : 16 Mei 2023

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

- | NAMA  | TANDA TANGAN  |
|---|---|
| 1. <u>Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.</u><br>Ketua Penguji/Pembimbing |  |
| 2. <u>Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si</u><br>Penguji Samping I  |   |
| 3. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u><br>Penguji Samping II     |   |

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rije Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Rahmad Mulyana

Nim : 19520002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1) STPMD "APMD" Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KEPADA MASYARAKAT, Studi Kasus Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri. Seluruh kata atau kalimat yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan sumbernya aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 13 Juni 2023

Membuat pernyataan



David Rahmad Mulyana

19520023



## MOTTO

“Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua.”

(aparat\_tidur)

“If you can’t handle small things, impossible for you to get big things.”

(Jika kamu tidak bisa menangani masalah kecil, mustahil untukmu mendapatkan hal yang besar.)

(David Rahmad)

“We didn’t do anything wrong, but somehow we lost.”

(Kami tidak melakukan kesalahan, tapi entah bagaimana kami kalah)

(Stephen Elop)

“If you do a good job, do it better.”

(Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, lakukan lebih baik lagi)

(Rudy Salim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tersayang dan ibunda tercinta yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Adik saya yang telah mau direpotkan dalam pendokumentasian penelitian ini.
3. Segenap keluarga dan sahabat yang sudah menyemangati bahkan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang telah sabar dalam memimbing saya dan bersedia mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tentunya saya mengucapkan terimakasih sebesar besarnya semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. Kepada senior saya Ahmad Fauzi Sabirin, S.I.P, dan Muhammad Fais Hakim Rasyid S.I.P, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesahku serta memberikanku motivasi dan semangat yang tiada hentinya.
6. Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul. Serta Pemerintah Kalurahan Karangrejek beserta

masyarakat. Yang telah memberikan waktu dan tempat untuk penulis untuk melakukan penelitian.

7. Pemerintah Kalurahan Karangrejek beserta masyarakat yang telah berkenan membantu penelitian ini
8. Kepada pasangan saya Septiana Dwi Aryanti, yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung apapun pilihan saya dan apapun yang sedang saya lakukan dalam kondisi bagaimanapun.
9. Kepada teman-teman penulis: Chesar Wahyu, M. Raffly, Galuh Kusuma, Anggit Dwi, Aditya Pradhana. Terima kasih yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, melakukan yang terbaik untuk saya dan selalu ada untuk saya. Terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Dampak Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan ,di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tersayang dan ibunda tercinta yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Segenap keluarga dan sahabat yang sudah menyemangati bahkan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, M.A. Selaku Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.



5. Bapak Drs, Sumarjono M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari semester awal, proses akademis hingga penulisan skripsi.
6. Untuk Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang telah sabar dalam membimbing saya dan bersedia mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tentunya saya mengucapkan terimakasih sebesar besarnya semoga Allah membalas kebaikan bapak.
7. Dosen penguji 1 Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si
8. Dosen penguji 2 Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
9. Seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta , yang telah membekali banyak pengetahuan.
10. Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunung Kidul. Serta Pemerintah Kalurahan Karangrejek beserta masyarakat. Yang telah memberikan waktu dan tempat untuk penulis untuk melakukan penelitian.
11. Para sahabat dan teman teman penulis yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XII</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>XIII</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3. Unit Analisis.....	29
a. Lokasi Penelitian.....	29
b. Objek Penelitian .....	29
c. Subjek Penelitian.....	29
4. Teknik Analisis Data.....	30
a. Reduksi Data (Data Reduction) .....	31
b. Penyajian Data (Data Display).....	31
c. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification).....	31
<b>BAB II</b> .....	<b>32</b>
<b>POTRET LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Potret Kabupaten Gunungkidul.....	32
B. Profil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.....	36
C. Potret Kalurahan Karangrejek.....	37
D. Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rusunawa Karangrejek. ....	39
<b>BAB III</b> .....	<b>41</b>
<b>ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR     LIMBAH (IPAL)</b> .....	<b>41</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>60</b>
<b>DOKUMENTASI TINDAK LANJUT LAPORAN DAN KELUHAN MASYARAKAT KEPADA UPT PALM DAN RUSUNAWA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 AKSES SANITASI 2018 .....	2
---------------------------------------	---



## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1. 1 KRETERIA EVALUASI .....	27
TABEL 1. 2 SUBJEK PENELITIAN .....	30
TABEL 2. 1 DAFTAR KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....	33
TABEL 2. 2 JUMLAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	39

## INTISARI

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang kemudian dilokalkan oleh Kemendes menjadi SDGs Desa. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu SDGs adalah air bersih dan sanitasi. Dengan adanya target pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah sanitasi limbah, maka pembangunan IPAL pun digalakkan. Salah satunya di daerah Gunungkidul yang baru saja usai membangun IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) di Kalurahan Karangrejek yang menjadi satu satunya Kalurahan di Gunungkidul yang mendapat program hibah IPAL. IPAL yang dibangun ini diharapkan akan banyak membantu mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Gunungkidul, terutama di Kalurahan Karangrejek Kecamatan Wonosari dimana sebelumnya ada permasalahan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Rusunawa Karangrejek. Rumusan masalah : Bagaimana dampak kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi masyarakat?

Dalam penelitian ini menggunakan kajian studi kasus kualitatif. Mengkaji tentang efalusi kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini berawal munculnya proyek pembangunan Rusunawa sehingga diperlukannya pembangunan saluran pembuangan limbah yang lebih memadai. Dalam pelaksanaan pembangunannya pemerintah terlalu tertutup sehingga muncul keluhan masyarakat mengenai penggunaan lahan yang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan pemerintah kalurahan pun hanya terlibat sebagai pembantu dalam mensosialisasikan program pembangunan IPAL tersebut dan juga tidak adanya studi kelayakan atau kajian kelayakan pembangunan. Sehingga disinilah muncul konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan petugas pembangunan atau penyedia jasa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek. Bagi masyarakat pembangunan ini memberi manfaat yang besar meskipun juga ada dampak negatifnya. Dengan contoh dibangunnya fasilitas ini masyarakat sangat merasa terbantu karena adanya fasilitas pembuangan air limbah yang disediakan oleh pemerintah, tetapi dalam pembangunannya kurang memperhatikan ketinggian bak penampungan dengan saluran rumah yang menimbulkan beberapa saluran rumah meluap. Selain itu juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari pelaksana teknis yang kemudian memunculkan bau tidak sedap di sekitar saluran air yang dilewati oleh pembuangan IPAL yang mengganggu masyarakat sekitar sungai yang dilewati oleh aliran pembuangan IPAL.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Dampak Kebijakan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pemerintah Daerah

## **BAB I**

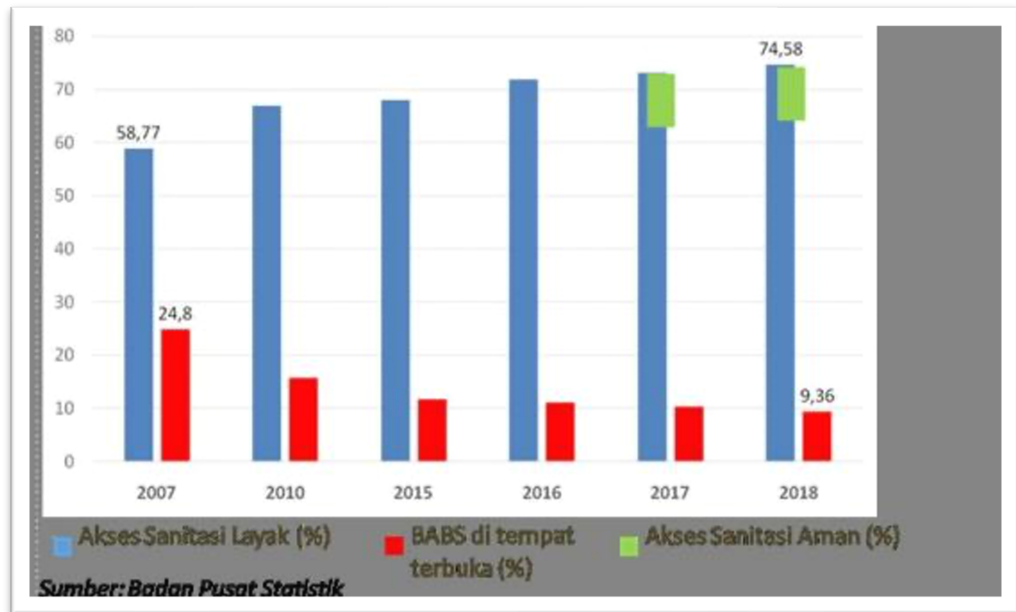
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan *Milenium* atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu SDGs adalah air bersih dan sanitasi. Meskipun hak atas air dan sanitasi tidak secara spesifik dinyatakan dalam ICESCR, air dan sanitasi merupakan bagian fundamental bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, dan karenanya juga harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak kepada standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR) serta hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR). Berdasarkan hal ini, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) akhirnya mengadopsi. Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air, yang mencakup hak atas sanitasi yang layak.

Target dan capaian akses air minum dan sanitasi untuk mengusulkan paket kebijakan nasional penuntasan akses air minum dan sanitasi yang operasional. Sejalan dengan hal tersebut, pada penyelenggaraan City Sanitation Summit (CSS) ke XIX di Banjarmasin, telah diselenggarakan pertemuan terbatas kepala daerah yang tergabung dalam Aliansi

Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan melahirkan sejumlah rekomendasi selain bagi segenap anggota yang sudah mencapai 492 kabupaten/kota, juga memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menjadi masukan paket kebijakan pada pemerintahan periode kedua presiden Jokowi.



Gambar 1. 1 Akses Sanitasi 2018

Capaian akses sanitasi layak tahun 2018 adalah 74,58%, termasuk akses aman 7,42%. Artinya masih ada 25,42% setara dengan 67,36 juta jiwa (dari 265 juta jiwa) belum memiliki akses sanitasi layak dan 9,36% atau 24,8 juta jiwa diantaranya masih buang air besar sembarangan (BABS). Peningkatan akses terhadap sanitasi layak rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Artinya untuk menuntaskan 25,42% yang belum memiliki akses layak, jika tanpa upaya khusus dengan peningkatan rata-rata 1,4% pertahun, maka perlu 18,16 tahun untuk menuntaskan yang belum memiliki akses layak. Penurunan tingkat praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka rata-rata sebesar 1,2% per tahun. Artinya untuk menuntaskan 9,36% yang masih BABS, maka diperlukan waktu 7,8 tahun untuk menuntaskannya. Target RPJMN 2020-2024 untuk akses sanitasi adalah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman 90% layak (termasuk 20% aman). Artinya dengan



melihat target dan peningkatan rata-rata pertahun perlu ada upaya 4 kali lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencapai target yang diinginkan.

Di era otonomi daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan fasilitatif kepala daerah merupakan penggerak utama pembangunan akses sanitasi dan air minum yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kendati demikian ditinjau dari fungsi pemerintah pusat dan provinsi dalam hal pengaturan, pembinaan dan pengawasan (turbinwas) juga sangat strategis dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi dan air minum nasional.

Adapun pengertian tentang akses sanitasi layak dan aman sebagaimana dalam materi paparan menteri Bappenas adalah:

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Sementara itu data dan fakta lain seperti yang diungkapkan Prasetyo, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam paparannya di CSS XIX Banjarmasin mengungkapkan fakta bahwa:

- Rata-rata alokasi APBD untuk sanitasi masih di bawah 2%.
- Sebanyak 54% dana hibah sanitasi tidak termanfaatkan.
- Sebanyak 90% kabupaten/kota belum memiliki perda bidang air limbah domestik.
- Rata-rata utilitasi keberfungsian Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dibawah 20%.
- Pemisahan operator dan regulator dalam pengelolaan air limbah baru dilakukan oleh 113 kabupaten/kota atau 20% dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

- Minimnya praktek penyedotan lumpur tinja, baik oleh tangki septik atau sanimas (komunal).

Di tingkat nasional, hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak juga dinyatakan di dalam UUD 1945. Hak-hak ini juga ditegaskan kembali di dalam UU No.11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR. Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya air, yaitu UU No.7/2004, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015. Dan “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat”. Selain itu juga ada beberapa aturan lain seperti :

- PP 16/2005 bab 3 tentang Perlindungan Air Baku, pada pasal 14 menyatakan bawasannya perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan sarana-prasarana sanitasi.
- PP 16/2005 bab 4 tentang Penyelenggaraan, pada pasal 23 menyatakan bawasannya penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah, dan apabila belum dapat terlaksana secara terpadu sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa dengan melokalkan atau membumikan SDGs menjadi SDGs Desa untuk mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan. "SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030. Ini ditetapkan dalam Permendesa PDTT Nomor 21/2020," kata Mendes PDTT yang akrab

disapa Gus Halim dalam inagurasi Deepening Desa Brilian 2022 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim, Kamis (14/7/2022).

Dalam SDGs Desa Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kemudian dikelompokkan menjadi 8 tipe desa membangun, salah satunya adalah 'Desa Peduli Kesehatan' dimana dalam tipe ini terbagi menjadi 3 fokus pembangunan diantaranya Desa Sehat dan Sejahtera, Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi, serta Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman.

Gunungkidul merupakan kabupaten ke 8 di Indonesia yang telah mendeklarasikan dirinya dari Stop Buang Air Besar Sembarangan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah ada kebijakan mengenai pembentukan Puskesmas di setiap desa untuk mengurangi kebiasaan buruk BABS. Menurut data BPS pada tahun 2020 presentase rumah tangga akses sanitasi layak di kabupaten gunungkidul mencapai 95,80%. Namun kondisi sanitasi di Kabupaten Gunungkidul saat ini masih dalam kondisi kurang baik sehingga sangat berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah.

Kondisi Kesehatan masyarakat gunungkidul dapat dilihat dari jumlah timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk dan kondisi pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi. Dari data profil Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2009 diperoleh bahwa jumlah rumahtangga yang telah menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PBHS) sebanyak 77.64%. angka tersebut cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masyarakat Gunungkidul telah menerapkan pola hidup sehat di keluarganya masing-masing. Sedangkan Jumlah kasus penyakit menular yang diakibatkan oleh sanitasi buruk seperti diare ditemukan sebanyak 8.340 kasus dengan penderita balita sebanyak 2.317 kasus pada tahun 2009.

Pada saat ini, PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul telah menyediakan air bersih sebanyak 658L/det untuk melayani 553.921 jiwa atau dengan cakupan pelayanan sebanyak 78%. Selain dari PDAM, masyarakat kabupaten Gunungkidul juga ada PAB Tirta Kencana di milik Kalurahan karang rejek yang melayani masyarakat kalurahan karangrejek dan sekitarnya, selain itu masyarakat juga melakukan pengambilan air sumur. Untuk kualitas air sumur berdasarkan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Gunungkidul terhadap sumur penduduk untuk parameter bakteriologi dari 600 sampel di 18 kecamatan diperoleh data 64% kualitasnya jelek atau hanya 36% saja yang baik.

Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di kabupaten Gunungkidul adalah mempergunakan sistem setempat (onsite system) berupa septictank, namun juga dijumpai penggunaan cubluk di beberapa tempat. Sampai saat ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa IPAL/IPLT dikarenakan kondisi daerah yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem ini. Walaupun demikian di beberapa lokasi sudah dibangun sistem komunal untuk melayani satu Kawasan pemukiman, pondok pesantren, pasar, industry tahu dan Rusunawa, melalui program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dan IPAL Komunal.

Sistem drainase di Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan topografi yang cukup terjal dan berbukit-bukit. Dengan kondisi seperti itu, air hujan yang jatuh dapat mengalir dengan lancar menuju 14 sungai yang ada di kabupaten Gunungkidul. Selain itu kondisi tanah di kabupaten Gunungkidul yang Sebagian berupa kars menyebabkan air hujan mudah terserap kedalam tanah melalui pori-pori maupun celah di dalam tanah.

Industri yang berkembang di kabupaten Gunungkidul sebanyak 19.255 unit usaha dengan kategori jenis usaha antara lain pengolahan pangan, batik, bahan bangunan, kerajinan, industry logam dan elektronik. Dimana jenis usaha yang paling berkembang adalah industry pengolahan pangan. Limbah industry yang dihasilkan oleh jenis industry



tersebut , memiliki kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid) yang tinggi. Dari pemeriksaan terhadap dua lokasi industry pengolahan makan yaitu Rumah Makan “RMP” dan industry makanan “NS”,dijumpai bahwa limbah yang dihasilkan telah melebihi baku mutu air limbah.

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat enam rumah sakit yaitu RSUD Wonosari, RS PKU Muhammadiyah Piyaman, RS Bhetesda Selang, RS Panti Rahayu Kelor, RS Pelita Husada Semanu, dan RS Nur Rohmah Playen. Selain itu juga terdapat 30 Puskesmas, 108 Puskesmas Pembantu, 28 Apotek, 45 Balai Pengobatan, dan 8 rumah bersalin. Dari sejumlah sarana Kesehatan tersebut dipastikam menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk menangani limbah medis, baru RSUD Wonosari yang telah memiliki IPAL di lingkungan rumahsakit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh limbah tersebut.

Kondisi Kalurahan Karangrejek sebelum terbangunnya IPAL Rusunawa ini menurut survei KEMENdes dalam segi Desa Layak Air bersih dan Sanitasi memiliki nilai 52,55%. Dimana di Desa Karangrejek masih banyak adanya pembuangan air limbah sembarangan (Peceren) disetiap rumah-rumahnya segingga menyebabkan tingkat kekumuhan yang lumayan tinggi, selain itu juga masih ada beberapa rumah yang belum memiliki jamban yang layak. Ditambah lagi dengan terbangunnya Rusunawa Karangrejek yang menambah kekumuhan di wilayah Kalurahan Karangrejek. Dengan tingkat kekumuhan yang tinggi maka juga menimbulkan potensi penyakit yang tinggi juga salah satunya penyakit Demam Berdarah (DBD).

Dengan adanya target pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah sanitasi limbah, maka pembangunan IPAL pun digalakkan. Salah satunya di daerah Gunungkidul yang baru saja usai membangun IPAL ( Instalasi Pengelolaan Limbah) di Kalurahan Karangrejek yang berkapasitas 360 SR (Saluran Rumah) dan untuk 1400 jiwa. Kalurahan

Karangrejek menjadi satu-satunya kalurahan di gunungkidul yang mendapatkan dana hibah guna pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dikarenakan di Kalurahan Karangrejek terdapat Rusunawa yang dimana itu dikelola oleh PEMda. Besar tampungan IPAL Rusunawa sendiri adalah 23m x 20m x1m, + 530m<sup>3</sup>. Dengan desain 20% untuk tampungan endapan dan 80% yang terus mengalir. Pembangunannya bekerja sama dengan penyedia jasa, CV. Hidayah Putra Abadi dan CV Gunung Mulia serta konsultan pengawas, CV. Bangun Cipta Persada dan CV. Bion Consultant. Pembangunannya pun dilaksanakan selama 120 hari atau 4 bulan. IPAL yang dibangun ini diharapkan akan banyak membantu mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Gunungkidul, terutama di Kalurahan Karangrejek Kecamatan Wonosari dimana sebelumnya ada permasalahan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Rusunawa Karangrejek. Selain itu IPAL ini akan melayani masyarakat di sekitar Rusunawa Karangrejek sebanyak 162 SR yang tersebar di dusun-dusun terdekat sekitar Rusunawa. Fasilitas IPAL ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Karangrejek. Fasilitas IPAL ini hanya dirasakan oleh pengguna Rusunawa Karangrejek dan sebagian masyarakat Padukuhan Karangduwet 1 yaitu RT 14, RT 15 dan RT 16.

Pada observasi awal peneliti menemukan bawasannya bagi masyarakat pembangunan ini memberi manfaat yang besar meskipun juga ada dampak negatifnya, seperti dengan dibangunnya fasilitas ini masyarakat sangat merasa terbantu karena adanya fasilitas pembuangan air limbah yang disediakan oleh pemerintah, namun dalam pembangunannya kurang mamperhitungkan ketinggian bak penampungan dengan saluran rumah yang menimbulkan beberapa saluran rumah meluap. Selain itu juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari pelaksana teknis yang kemudian memunculnya bau tidak sedap di sekitar saluran air yang dilewati oleh pembuangan IPAL yang mengganggu masyarakat sekitar sungai yang dilewati oleh aliran pembuangan IPAL.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi berupa jurnal yang terkait dengan judul skripsi penulis. Pada penelitian pertama mengenai Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Industri Agar-Agar telah dilakukan oleh Adelia Puspita Sari dan Adhi Yuniarto (2016) yang menghasilkan kesimpulan Pengolahan air limbah secara fisik kimia dapat dipilih untuk diterapkan pada industri agar-agar dikarenakan karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari pencucian agar-agar ,memiliki pH basa yang akan menyulitkan untuk diolah secara biologis.

Penelitian kedua tentang Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik (Grey Water) Di UPT RUSUNAWA Graha Bina Harapan, Kota Yogyakarta, DIY telah dilakukan oleh Paramita Dwi Sukmawati, dkk (2019) yang menghasilkan kesimpulan Pengolahan air limbah pada IPAL yang direncanakan menggunakan sistem semi kontinyu. Unit yang direncanakan pada IPAL adalah grease trap, flotasi, ekualisasi, biofilter aerob, sedimentasi, drying bed, disinfeksi.

Penelitian lain tentang Kajian Study Kelembagaan Kebijakan serta Oprasional Pengolahan IPAL jalan Jelawatan Kota Samarinda yang dilakukan oleh Sentot Sugiyono (2014) yang menghasilkan kesimpulan Stabilitas diarahkan untuk mempertahankan suatu kelembagaan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki kelemahan.

Penelitian lain tentang Implementasi Kebijakan Limbah Cair Rumah Sakit Berbasis Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Evaluasi Dampak Kebijakan Terhadap Bahaya dan Risiko yang dilakukan oleh Benyamin sugеха (2009) menghasilkan kesimpulan Perlunya perbaikan lebih lanjut, karena keadaan demikian tidak dapat diterima, namun aktivitas dapat diijinkan berjalan dalam pengontrolan khusus (OHSAS 18001).

Penelitian selanjutnya tentang Eektivitas Pemanfaatan Program Bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Tety Thalib, dkk (2018) yang

menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi kepada masyarakat yang massif sangatlah diperlukan serta perawatan IPAL secara berkala sangatlah menjadi kunci keberhasilan.

Penelitian lain tentang Evaluasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor yang dilakukan oleh Dhama Susanti, dkk (2018) yang berkesimpulan Sebagai upaya meningkatkan kualitas efluen maka diperlukan optimalisasi pengelolaan fasilitas IPAL komunal.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Melihat fenomena tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang “DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) KEPADA MASYARAKAT”. Mengingat bahwa pembuangan limbah sangatlah berpengaruh terhadap Kesehatan lingkungan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana dampak kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi masyarakat?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan IPAL bagi masyarakat.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

## 2. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran kepada pihak terkait, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Serta menjadikan sarana sanitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif pilihan teknologi sanitasi untuk pemerintah.

## E. Kerangka Konseptual

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Secara *etimologi* pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : (Syafii:2015)

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 aspek yaitu rakyat dan pemerintah, yang keduanya saling berhubungan satu sama lainnya.
2. Setelah ditambah “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. Menurut Strong

(dalam Syafiie,2015) menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara.

Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan Angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Menurut Ndraha (2015) Pemerintah adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, *consumer*, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal ini yang membentuk hubungan dalam pemerintahan.

Menurut Apter (dalam Syafiie,2015) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan pelaksanaan. Sedangkan menurut Syafiie (2015) menjelaskan bahwa pemerintah ialah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara negara dapat tercapai.

Menurut Humes IV (dalam Nurcholis:2011) hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan dalam sistem pengawasannya. Berdasarkan sistem pengawasannya inilah terbentuk tata hubungan pemerintahan dalam suatu negara. Humes IV menjelaskan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah didasarkan pada dua dimensi :

1. *Control hierarchy* (pengawasan hirarki) dan
2. *Functional control* (pengawasan fungsional).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah adalah subdivisi pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah langsung dibawah pemerintah pusat, sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah dibawah negara bagian. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap pemerintah pusat sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap negara bagian (Hoessein dalam Nurcholis:2011). Oleh karena itu, dalam negara kesatuan dan negara koalisi, pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah daerah hanya merupakan bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan pusat, maka terdapat hubungan antar pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah pusat.

Jika demikian, maka dalam pemerintah pusat terdapat dua subsistem : 1. Subsistem pemerintah pusat dan 2. Subsistem pemerintah daerah. Dalam subsistem pemerintah daerah terdapat subsistem pemerintahan daerah yang lebih kecil. Misalnya di Indonesia ada subsistem pemerintah pusat yang terdiri dari seorang presiden dan menteri. Subsistem pemerintahan nasional merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional.

Untuk dapat membentuk jalinan hubungan pemerintahan yang sistematis dengan hasil guna yang maksimal, setiap negara mengembangkan hubungan antar Lembaga negara dan hubungan antar pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Pada tingkat nasional diatur hubungan antar Lembaga tinggi negara dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Di daerah diatur hubungan antar Lembaga daerah dan hubungan antar pemerintah daerah. Tata kerja dan mekanisme hubungan antar pemerintahan demikian diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat. ( Nurcholis:2011)

Segala sesuatu di dunia ini tidak lepas dari kebijakan publik, karena semuanya diatur dan diwujudkan melalui kebijakan. Perlu ditekankan bahwa kebijakan ini dilaksanakan oleh beberapa aktor berpengaruh, dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Mulailah dengan kebijakan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dll. Dengan merumuskan keputusan kebijakan publik, kebijakan publik akan berdampak



langsung pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, akan ada banyak orang yang terlibat di semua tingkatan proses.

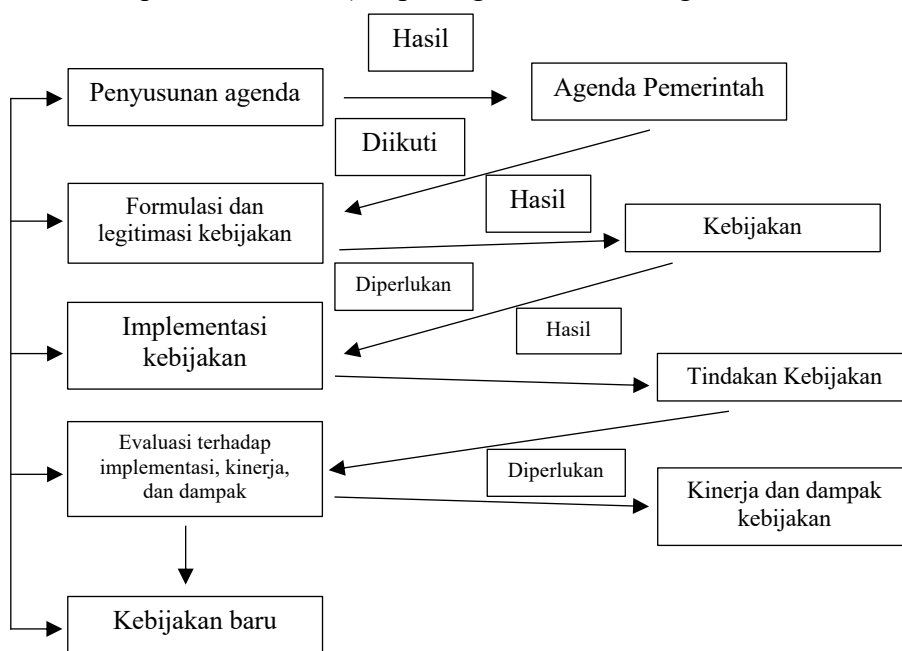
Menurut Dye (dalam Nafi' ah, 2015) mendefinisikan kebijakan public sebagai " is whatever government choose to do or not to do" (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat public semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano (dalam Nafi'ah, 2015) yang menyatakan bahwa kebijaka publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik tau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini sangat kompleks. Hal ini dikarenakan perilaku masyarakat dalam tatanan sosial yang semakin beragam, ditambah dengan perkembangan berbagai bidang, sehingga tidak menutup kemungkinan meningkatya permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada perlu diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah secara tepat waktu, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan selanjutnya.

Karenanya, kehidupan saat in akan selalu menghadapi kebijakan publik. Mengenai kebijakan publik, beberapa orang memiliki definisi sendiri-sendiri. Menurut Friedrich

(dalam Saputri, 2018) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Namun definisi ini mendapat kritik dari berbagai tokoh, yang menekankan pada arah tindakan yang diusulkan, dan definisi kebijakan publik tidak terbatas pada apa yang diusulkan, tetapi juga mencakup apa yang sebenarnya dilakukan. Ditekankan bahwa definisi kebijakan dari konten yang diusulkan kurang tepat, karena nantinya kebijakan tersebut juga akan mencakup tahapan implementasi dan evaluasi.

Adapun tahapan kebijakan public tersebut menurut Ripley (dalam Taufiqurokhman,2014) dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Ripley, 1985 (dalam Saputri,2018)

Sebagaimana diketahui bersama, kebijakan seringkali menemui kendala dalam proses pengadaan, bahkan masalah tersebut tergolong masalah yang kompleks. Di sisi lain, karena adanya kepentingan kelompok atau partisipan kebijakan itu sendiri, pengadaan program juga menghadapi tantangan. Dalam hal ini, ada enam jenis strategi yang dapat menimbulkan masalah, antara lain:

1. Kebijakan-kebijakan baru

Karena beberapa alasan, kebijakan baru tersebut sulit diterapkan. Pertama, belum ada saluran komunikasi baru yang dibuat, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi. Kedua, tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. Ketiga, instruksi implementasi tidak konsisten. Keempat, sumber daya seperti sumber daya manusia dan fasilitas langka. Ini karena informasi tentang bagaimana menerapkan prosedur baru untuk mencapai tujuannya tidak mudah diperoleh. Demikian pula, mungkin tidak ada cukup staf untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Selain itu, prosedur baru seringkali kekurangan personel yang terampil. Badan-badan yang ada sering kali memikul terlalu banyak tanggung jawab perencanaan baru karena peningkatan staf. Kelima, kebijakan baru biasanya menyesuaikan dengan SOP lama, dan SOP lama tersebut tidak sesuai untuk diterapkan dalam kebijakan baru. Dengan demikian, faktor penyebab utama kegagalan implementasi tipe kebijakan baru adalah karena belum dipenuhinya syarat-syarat •bagi implementasi kebijakan yang efektif. Model implementasi kebijakan mana pun akan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk berhasil.

2. Kebijakan yang didesentralisasikan

Implementasi yang terdesentralisasi berarti banyak orang yang terlibat. Kebijakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain penegakan hukum, hak sipil, perlindungan konsumen, bantuan pendidikan pemerintah, dan perlindungan

lingkungan. Semakin banyak pelaksana berpartisipasi, semakin besar pula pengawasan dari pelaksana tersebut. Namun, informasi tentang pekerjaan pelaksana seringkali kurang. Pada akhirnya hal ini akan menghambat proses monitoring yang akan dilakukan. Di satu sisi, jumlah eksekutif yang banyak akan berpotensi menjadi sumber implementasi kebijakan, namun di sisi lain akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan.

### 3. Kebijakan kontroversial

Kebijakan kontroversial sering kali melibatkan banyak kepentingan yang berbeda. Sasaran kebijakan yang ingin dicapai harus mencerminkan tujuan aliansi supporter. Pada saat yang sama, ambiguitas dalam kebijakan tersebut akan mendorong legislatif untuk menghindari tanggung jawab dengan membiarkan eksekutif atau komite pengawas dikritik dalam keadaan tertentu ketika undang-undang tersebut diterapkan. Selain itu, kebijakan yang kontroversial seringkali mendorong pihak-pihak terkait untuk mempengaruhi pelaksana sehingga arah kebijakan menjadi tidak konsisten.

### 4. Kebijakan-kebijakan yang kompleks

Kebijakan kompleks biasanya memiliki banyak tujuan, dan karena tujuan tersebut sangat kompleks, pengambil keputusan tingkat tinggi sering tidak tahu bagaimana mendefinisikannya secara rinci. Akibatnya, undang-undang terkait kebijakan cenderung kabur. Selain itu, pedoman pelaksanaan yang terlalu ketat juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan, karena pedoman yang ketat akan menghambat kreativitas atau inisiatif pelaksana.

### 5. Kebijakan yang krisis

Contoh umum dari kebijakan tersebut adalah kebijakan dengan negara lain atau negara yang berkonflik. Pesan diplomatik yang dikirim antar negara musuh

seringkali tidak jelas dan sulit dijelaskan. Selain itu, tidak ada sumber atau peralatan yang rusak. Situasi krisis biasanya membutuhkan tindakan yang cepat dan fleksibel, dan tindakan restriktif tidak disarankan. Di sisi lain, kebiasaan yang selama ini digunakan tidak mudah untuk diubah. Hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### 6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan

Keputusan pengadilan yang berwenang biasanya berbentuk ketidakjelasan. Selain itu, putusan pengadilan tampaknya tidak konsisten, karena hakim tidak secara eksplisit mengabaikan putusan yang lalu.

Dalam studi ini, kebijakan pembangunan instalasi pengolahan limbah masyarakat merupakan kebijakan krisis. Kuncinya, kebijakan adalah kebijakan yang mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka untuk mengubahnya harus membangun kepercayaan dan sikap yang baik dengan masyarakat, karena jika demikian maka masyarakat dapat mengabaikan kebijakan tersebut. Tidak dimplementasikan dengan benar, Jika hal ini terjadi maka akan terjadi stagnasi kebijakan, dan akan menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat beberapa upaya untuk mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik yakni, Pertama, memahami hambatan yang timbul serta alasan yang melatar belakangnya. Kedua, menemukan dan mengaplikasikan jalan keluar dari faktor penghambat tersebut serta. Misalnya, kurangnya kemampuan anggota legislatif dapat diatasi melalui pendidikan, workshop maupun training. Kurangnya saluran-saluran komunikasi yang efektif diatasi dengan penciptaan saluran-saluran baru yang lebih efektif dan lain sebagainya. Dengan demikian, masalah implementasi kebijakan dapat diatasi dengan cara pengenalan terhadap masalah

yang timbul beserta latar belakang yang melingkupinya, baru dibuat usulan-usulan untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya.

Menurut Ndraha (2015) Organisasi Pemerintahan, adalah organisasi formal. Struktur organisasinya pun formal, Begitu sebugh organisasi formal di bentuk, di dalamnya secara spontan terbentuk pula organisasi informal. Menurut Syafice (dalam Sari dkk,2018) Keorganisasian dapat diartikan sebagai berikut :

1. Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan Bersama
2. Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama
3. Bagaimana sifat sebuah bentuk pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang
4. Bagaimana sifat sebuah bentuk system tentang aktifitas kerjasama dua orang/lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang buluh, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi

Berikut ini lima karakteristik organisasi pemerintah yang birokratis (Darmanto,2006):

1. Pemerintahan diorganisasi secara birokratis Kegiatan yang menyangkut perencanaan dan pemikiran dipisahkan dari aspek pelaksanaan dimana fungsi pelaksanaan dibagi serta dikelompokkan menurut fungsi, yang dibagi lagi ke dalam unit yang lebih kecil. Unit dipisahkan ke dalam pekerjaan yang dirinci dalam tugas yang lebih khusus. Model kegiatan atau pekerjaan seperti ini sudah menjadi sesuatu yang rutin dan diterima secara meluas serta dianggap sebagai suatu keharusan, bukan lagi sekedar tanggapan terhadap suatu permasalahan yang muncul harus disclesaikan, Dampak

dari fungsi pelaksanaan tersebut menyebabkan para pegawai terikat dalam mesin birokratis yang monoton, kaku, serta menjadi tidak kreatif dan tidak responsif.

2. Sistem penggajian organisasi pemerintah yang tidak memadai Selain jumlah PNS yang sangat besar, sistem penggajian PNS juga tersentralisasi sehingga beban Negara untuk membayar seluruh PNS sangat besar dan berat. Sampai sekarang negara kesulitan untuk menerapkan sistem gaji berdasarkan prestasi sehingga pegawai kurang tertantang dan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya otonomi daerah maka pemda sebenarnya dapat menerapkan sistem penggajian berdasarkan prestasi.
3. Organisasi pemerintah memiliki monopoli Pemerintah memiliki kekuasaan atas rakyatnya sehingga pemerintah juga mempunyai hak memonopoli sebagian atau semua bidang aktivitas yang ada di wilayahnya. Dengan monopoli tersebut maka pemerintah hanya mendapat tekanan pengaruh yang kecil dari masyarakat, pelanggan, atau pesaingnya. Monopoli biasanya bersifat negatif di mana hal tersebut dapat menyebabkan hampir tidak adanya konsekuensi apapun terhadap kinerja yang dilakukan sehingga mereka lebih memfokuskan perhatian ke dalam, pada diri mereka sendiri (inward looking).
4. Organisasi pemerintah bersifat non profit. Kegiatan pelayanan umumnya tidak dilakukan oleh organisasi swasta, Pegawai pemerintah lebih memperhatikan status birokratis, jabatan, kepangkatan, dan anggaran yang tersedia daripada harus memikirkan misi organisasi serta pencapaian hasil kerjanya. Pegawai negeri memperoleh gaji bukan karena prestasi kerja tapi karena lebih sekedar kepatutan yang diberikan pemerintah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pegawai. Jika pemerintah membayar kurang pantas disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

5. Organisasi pemerintah diorganisasi dalam hirarki berlapis Dalam bidang kepegawaian maka aturan kepangkatan akan menentukan wewenang, jabatan, gaji, dan peluang karir. Pada bidang tersebut terdapat kelompok orang yang memberi perintah dan yang melaksanakan perintah. Semakin tinggi jabatan seseorang akan diikuti dengan semakin tingginya kewenangan memberi perintah. Pegawai pemerintah cenderung takut melakukan pekerjaannya dan takut berbuat salah. Mereka terbiasa dalam lingkungan kerja yang menunggu perintah dari pimpinan. Jika mereka, ingin mengubah sesuatu atau memiliki inisiatif dalam bekerja maka mereka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya. Dalam birokrasi pemerintah, seorang atasan pada umumnya kurang menginginkan bawahannya memiliki kreatifitas tinggi yang melebihi dirinya karena takut tersaingi. Dalam organisasi pemerintah, orang yang kurang pandai memungkinkan menduduki suatu jabatan dimana dia dapat memerintah bawahan yang mungkin lebih pandai karena faktor kedekatan dengan pimpinan.

Evaluasi berasal dari kata Bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan isilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Menurut Arikunto dalam Suleman, (2011:11) pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut



menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Echols dan Shadily dalam Suleman, (2011:11) mengatakan bahwa Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat di evaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Menurut Dror dalam Abidin, (2002:221) dikemukakan bahwa evaluasi sebagai sebuah proses yang utuh, mengemukakan elemen-elemen. outputs, inputs, kriteria (criteria) dan standar.

Hoogwood dalam Abidin, (2002:221) memandang evaluasi dalam posisi sebagai proses, dan mengemukakan beberapa aspek yang dapat digolongkan sebagai elemen dari kebijakan, yaitu : obyektif atau tujuan, kriteria, dampak sampingan, informasi, outcomes, multiprogram targets, distribusi dampak.

Luankali, (2007:93) mendefinisikan evaluasi adalah langkah terakhir dari proses atau prosedur analisis kebijakan evaluasi mempunyai tiga arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program, tiga arti evaluasi tersebut adalah penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment); yang mengandung : 1) usaha menganalisis hasil kebijakan berupa satuan nilainya, 2) produksi informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, 3) hasil konkrit (manfaat) yang member sumbangan pada tujuan atau sasaran dari kebijakan, 4) hasil tersebut dinyatakan dalam kinerja yang bermakna (masalah-masalah sudah diatasi atau telah jelas).

Mustopadidjaja, (2003:45) mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atau sesuatu fenomena, didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu.

Rutman dalam Agusturiso, (2012:8) memandang evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat

keputusan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.

Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas dalam Suleman, (2012:8) memberikan pengertian evaluasi program adalah : “proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan”.

Menurut Djaali dan Pudji dalam Suleman, (2011:8) evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sedangkan Ahmad dalam Suleman, (2011:8) mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek,dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Sedangkan Uzer dalam Suleman, (2011:9) mengatakan bahwa: Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Arikunto dalam Suleman, (2011:9) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sementara Dunn, (2003:608) mengemukakan bahwa “evaluasi mempunyai arti yang

berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan program”.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Ini berarti, ketika hasil kebijakan pendidikan pada kenyataannya memiliki nilai. Hal ini disebabkan karena hasil kebijakan tersebut memberi sumbangan yang positif terhadap tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, dan dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah kebijakan pendidikan telah dibuat secara jelas dan atau teratasi.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah ditentukan.

Berbagai definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tersebut digunakan untuk menentukan informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003:609). Identifikasi indikator dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, yang meliputi teori-teori dan kebijakan yang terkait dengan program Sanitasi Limbah. Dengan menggunakan indikator dan tolok ukur yang telah dihasilkan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sanitasi Limbah di Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi diterapkan secara retropektif (ex-post), sedangkan kriteria untuk merekomendasikan diterapkan secara perspektif (ex-ante). Secara umum tolok ukur yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu program (Dunn, 2003:610) meliputi :

1. Efektifitas : berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi : berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan atau adequacy : berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Responsivitas : berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.
5. Ketepatan : kriteria ini untuk mengukur apakah tujuan dari program telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum.

Untuk menjawab hal-hal tersebut analisis dapat mempertimbangkan semua kriteria secara bersama-sama.

Tabel 1. 1 Kreteria Evaluasi

<b>NO</b>	<b>Tipe Kreteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Efektifitas	Apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai ?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah dicapai memecahkan masalah ?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kelompok kelompok tertentu ?
5.	Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar bernilai serta tepat sasaran ?

Sumber : Dunn, 2003

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kajian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah guna memotret fakta lapangan dengan mengamati secara langsung aktivitas sehari-hari pemerintah yang kemudian proses perubahan tersebut peneliti menarasikan dampak kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rusunawa Karangrejek di Kalurahan Karangrejek. Dalam menjelaskan dampak kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rusunawa Karangrejek peneliti terlibat langsung dalam aktivitas keseharian masyarakat sekitar Rusunawa Karangrejek.

Dalam kehidupan sehari-hari peneliti memberikan banyak pelajaran dan pengertian mengenai dampak kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) Rusunawa Karangrejek yang di kelola oleh UPT PALM DPUPR Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian lebih lanjut yang dilakukan selama 2 bulan peneliti berinteraksi dengan banyak pihak mulai dari masyarakat, RT,RW,Dukuh,Lurah, UPT PALM DPUPR Kabupaten Gunungkidul, Cipta Karya DPUPR Kabupaten Gunungkidul dan Sekretaris Dinas DPUPR Kabupaten Gunungkidul dan Interaksi antara DPUPR Kabupaten Gunungkidul, Lurah, Pamong dan Masyarakat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan berupa data yang berbentuk berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Observasi partisipan, peneliti terjun langsung kedalam lingkungan kalurahan melalui kehidupan sehari-hari peneliti yang hidup di Kalurahan Karangrejek sehingga mengetahui keseharian para pemerintah kalurahan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek. Kemudian, memperhatikan perilaku pemerintah, masyarakat dan aparat pelaksana baik saat terlibat dalam kegiatan sehari-hari maupun ketika peneliti melakukan proses tanya jawab dengan informan.

Kedua, Wawancara. Wawancara merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus, yang paling umum yakni wawancara studi kasus bertipe open-ended. Artinya peneliti dapat bertanya responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Peneliti bahkan bisa meminta responden untuk menyetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan

menggunakan proporsi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya (Yin, 2012). Peneliti menggunakan teknik ini dalam mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan. Kata-kata, ide, ataupun komentar dalam proses wawancara menjadi data primer bagi peneliti tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat Kalurahan Karangrejek menjelaskan makna-makna subjektif atas fenomena atau fakta lapangan yang mereka alami. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul, Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum dan Rumah Susun, Pengurus IPAL Rusunawa Karangrejek, Masyarakat penerima fasilitas IPAL dan Masyarakat disekitar bak penampungan IPAL.

### 3. Unit Analisis

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat disana terdapat infrastruktur IPAL yang dikelola DPU Kabupaten Gunungkidul.

#### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dampak yang dihasilkan dari kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

#### c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Dalam menentukan narasumber penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu narasumber ditentukan dan dipilih oleh peneliti yang dipandang memiliki kapasitas dalam menunjang data yang dibutuhkan oleh peneliti dan bersifat representatif.

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Putro Sapto W,M.Si	L	Sekretaris Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul
2.	Agus Subariyanta S.T	L	Ka. Bidang Cipta Karya DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul
3.	Aryanto	L	Petugas/apparat IPAL Rusunawa Karangrejek
4.	Supramonco	L	Lurah Kalurahan Karangrejek
5.	Suwarna	L	Dukuh Padukuhan Karangduwet 1
6.	Sigit Purwanto	L	Ketua RW 06 Karangduwet 1
7.	Sugiyanto	L	Ketua RT 14 Karangduwet 1
8.	Suratman	L	Ketua RT 15 Karangduwet 1
9.	Juminem	P	Masyarakat
10.	Samiyo	L	Masyarakat
11.	Mardi	L	Masyarakat
12.	Shovi Ma'unah	P	Masyarakat
13.	Wartini	P	Masyarakat
14.	Rifkhi Saputra	L	Masyarakat
15.	Juwarni	P	Masyarakat
16.	Hadi Purwanto	L	Masyarakat

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengamatan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data-data tersebut agar dapat diinterpretasikan



kepada orang lain. Pada tahap analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan data-data yang telah terkumpul menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.

Teknik analisis data ini menurut Miles dan Huberman (2014:246-253) dibagi menjadi 3 macam analisis data, yaitu : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan salah satu teknik dari analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan ), matriks, grafik, jaringan dan bagan

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh untuk mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka dan menarik kesimpulan secara final. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan (Suyitno, 2018: 129-131).

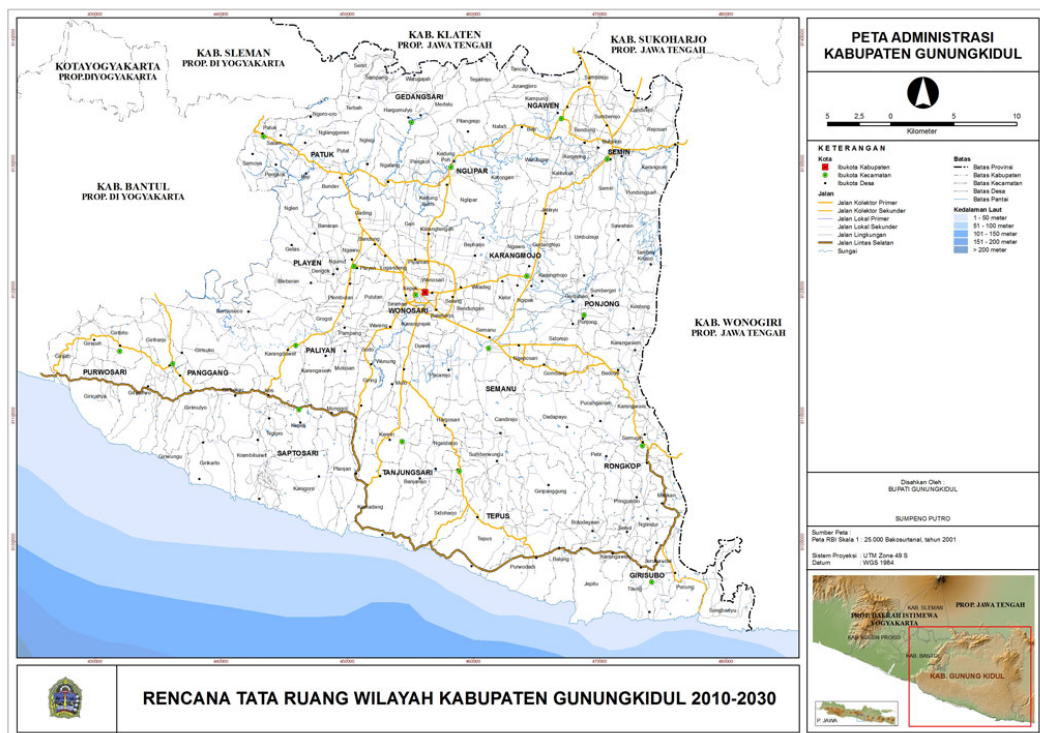
## BAB II

### POTRET LOKASI PENELITIAN

#### A. Potret Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan ibukota kabupatennya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul terletak di 110°21' sampai 110°50' bujur timur, 7°46' sampai 8°09' lintang selatan. Kabupaten gunungkidul di sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman (Provinsi DIY), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 mempunyai penduduk sebanyak 747.161 jiwa yang tersebar ke 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan.

No.	Kapanewon	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Panggung	99,80km <sup>2</sup>	29.853 jiwa
2.	Purwosari	71,76 km <sup>2</sup>	21.238 jiwa
3.	Paliyan	58,07 km <sup>2</sup>	33.442 jiwa
4.	Saptosari	87,8 km <sup>2</sup>	39.168 jiwa
5.	Tepus	104,91 km <sup>2</sup>	36.865 jiwa
6.	Tanjungsari	71,63 km <sup>2</sup>	29.602 jiwa
7.	Rongkop	83,46 km <sup>2</sup>	29.985 jiwa
8.	Girisubo	94,57 km <sup>2</sup>	26.428 jiwa
9.	Semanu	108,39 km <sup>2</sup>	59.726 jiwa
10.	Ponjong	104,49 km <sup>2</sup>	54.052 jiwa
11.	Karangmojo	80,12 km <sup>2</sup>	57.127 jiwa
12.	Wonosari	75,71 km <sup>2</sup>	88.643 jiwa
13.	Playen	105,26 km <sup>2</sup>	65.930 jiwa
14.	Patuk	72,04 km <sup>2</sup>	34.648 jiwa
15.	Gedangsari	68,14 km <sup>2</sup>	39.954 jiwa
16.	Nglipar	73,87 km <sup>2</sup>	34.960 jiwa
17.	Ngawen	46,59 km <sup>2</sup>	35.451 jiwa
18.	Semin	78,92 km <sup>2</sup>	57.145 jiwa

Tabel 2. 1 Daftar Kapanewon Kabupaten Gunungkidul

Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul secara yuridis memiliki status sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 tahun 1950 dan peraturan pemerintah no 32 tahun 1950.

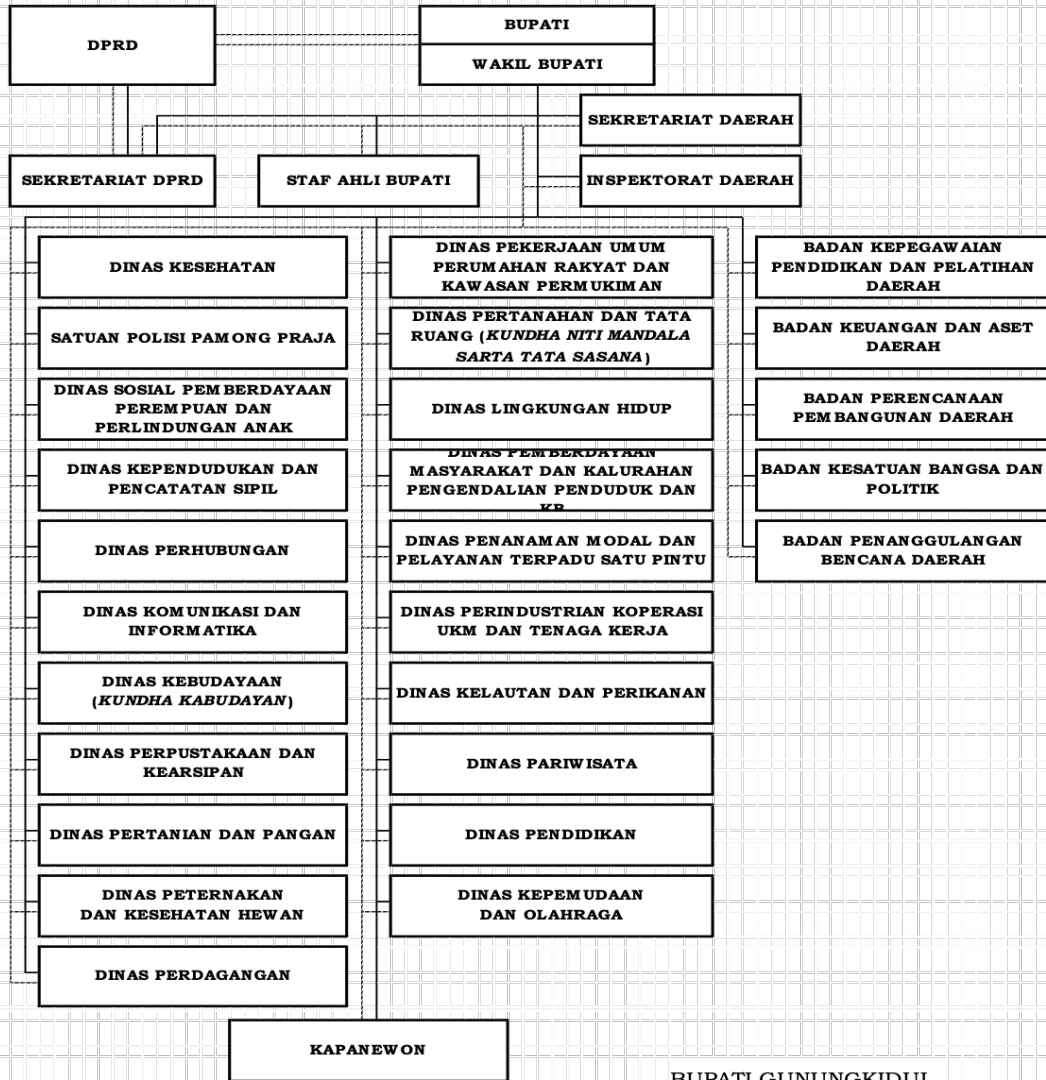
Berdasarkan Peraturan Daerah no 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah, di Kabupaten Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan kongruen terdiri atas urusan pemerintahan wajib (urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan peraturan daerah no 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul telah di bentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Badan Daerah

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR            TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



— : Komando  
 - - - : Koordinasi  
 □ : Disubordinasi  
 □ : Pembinaan  
 □ : Perhubungan

BUPATI GUNUNGGKIDUL,  
  
 SUNARYANTA

Gambar 2. 2 Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

## B. Profil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman di Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman.

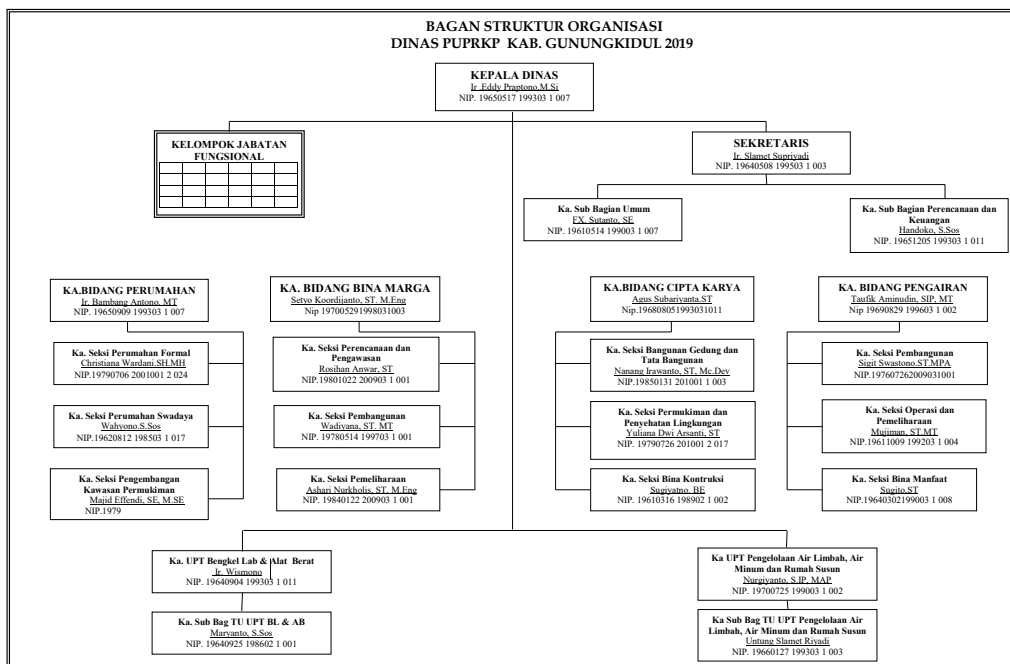
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul berdiri mulai 1 Januari 2017 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul no 139 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman. Dalam struktur organisasi Dinas terdiri dari 1 Kepala dinas yang membawahi 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 2 UPT.

Yang bertanggung jawab dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) Rusunawa Karangrejek adalah UPT Ciptakarya DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya adalah UPT PALM DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul.

Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 adalah :

Visi : **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026.”**

- Misi : 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis;  
2. Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul

### C. Potret Kalurahan Karangrejek

Kalurahan Karangrejek merupakan bagian dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Wonosari terdiri atas 14 Kalurahan yaitu: Kalurahan Wonosari, Kalurahan Kepek, Kalurahan Piyaman, Kalurahan Gari, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Selang, Kalurahan Baleharjo, Kalurahan Siraman, Kalurahan Pulutan, Kalurahan Wareng, Kalurahan Duwet, Kalurahan Mulo, Kalurahan Wunung dan Kalurahan Karangrejek. Kalurahan Karangrejek memiliki luas wilayah 514,8005 Ha. Jarak Kalurahan Karangrejek dari

pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten ialah 2 Km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan provinsi ialah 40 Km. Kalurahan Karangrejek dilintasi oleh jalan Baron pada hampir pertengahan Kalurahan sehingga membagi Kalurahan dalam 2 bagian yang hampir sama luasnya. Batas Kalurahan Karangrejek sebelah Utara ialah Kalurahan Baleharjo dan Kalurahan Siraman, sebelah timur ialah Kalurahan Pacarejo dan Semanu, sebelah Selatan ialah Kalurahan Duwet, dan batas sebelah Barat ialah Kalurahan Siraman dan Kalurahan Wareng.

Kalurahan karangrejek memiliki curah hujan 20 s/d 25 mm/tahun dan bulan hujan yang berjumlah 6 bulan. Kelembabab udara di Kalurahan Karangrejek dapat mencapai 90, dengan suhu rata-rata harian yaitu 30 derajat celcius. Jarak ketinggian dari permukaan air laut adalah 300m.

Sebagian besar tanah yang di Kalurahan Karangrejek merupakan tanah yang bertekstur seperti pasir dan berwarna merah dengan tingkat kemiringan tanah 20 derajat.

Keadaan topografi di Kalurahan Karangrejek terdiri dari dataran rendah dengan kondisi yang berbukit-bukit yang dialiri sungai-sungai. Kalurahan Karangrejek memiliki dataran rendah seluas 45,29 ha/m<sup>2</sup>.

Kalurahan Karangrejek memiliki jumlah penduduk 6.201 jiwa, dengan 1.782 KK. Berikut merupakan data-data terkait dengan kependudukan ;

NO	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa (%)
1	Perempuan	3.104 (50,06%)
2	Laki-laki	3.097 (49,96%)



<b>jumlah</b>	6.201 (100%)
---------------	--------------

Tabel 2. 2 Jumlah berdasarkan jenis kelamin

Kalurahan Kalurahan Karangrejek terbagi menjadi 8 padukuhan, salah satunya padukuhan Karangduwet 1 yang memiliki jumlah penduduk 982 jiwa dengan 277 KK. Yang terbagi menjadi 2 RW dan 5 RT.

#### D. Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rusunawa Karangrejek.

Proyek pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek ini dilatar belakangi oleh proyek sebelumnya yaitu proyek pembangunan Rumah Susun (Rusunawa Karangrejek) yang dimana memerlukan adanya tampungan limbah rumah tangga. Proyek pembangunan IPAL Rusunawa ini menggunakan dana APBD Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2019 sejumlah Rp.2.582.570.000,00. Pembangunan IPAL ini berkapasitas 360 saluran rumah yang pada dasarnya ditujukan untuk memfasilitasi pengguna Rusunawa Karangrejek, namun kemudian IPAL ini dikembangkan untuk memfasilitasi masyarakat sekitar Rusunawa Karangrejek lebih tepatnya Padukuhan Karangduwet 1.

Kondisi sanitasi limbah dan air bersih di Kalurahan Karangrejek sendiri tergolong bagus, dimana lebih dari 90% masyarakatnya sudah memiliki saptiktank sendiri. Selain itu juga Kalurahan Karangrejek memiliki Pengolahan Air Bersih sendiri yang dikelola oleh BUMKal yaitu PAB Tirta Kencana yang berlokasi di padukuhan Karangduwet 1. Untuk kondisi sanitasi di Padukuhan Karangduwet 1 semua masyarakatnya sudah memiliki saptiktank.

Meskipun masyarakat sudah memiliki tempat pembuangan air limbah sendiri namun dengan adanya proyek pembangunan IPAL Rusunawa ini masyarakat

menerima dengan senang dan bahkan tidak ada penolakan pada awal pembangunannya. Semua masyarakat yang terdaftar sebagai penerima fasilitas IPAL ini mendukung penuh pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek ini.

Fasilitas IPAL ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Karangrejek. Fasilitas IPAL ini hanya dirasakan oleh pengguna Rusunawa Karangrejek dan sebagian masyarakat Padukuhan Karangduwet 1 yaitu RT 14, RT 15 dan RT 16.

Berikut merupakan data rincian pembagian fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek :

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Rusunawa Karangrejek	196
<b>2</b>	RT 14	64
<b>3</b>	RT 15	73
<b>4</b>	RT 16	27
<b>Total</b>		<b>360</b>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas sebelumnya tentang Dampak Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rusunawa Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan ini sangat memberi banyak dampak positif bagi masyarakat karangrejek.
2. Pembentukan kebijakan poembangunan IPAL di rusunawa karangrejek dalam perencanaannya kurang melibatkan pemerintah desa (masyarakat sekitar) masyarakat tidak tahu menahu tentang asal-usul proyek pembangunan IPAL tersebut.
3. Dalam perencanaan pembangunan kurangnya memperhitungkan desain matang aliran pembuangan dan bak pembuangan sehingga ketika terjadinya hujan masih terdapat beberapa saluran rumah yang meluap dikarenakan ketinggiannya lebih rendah dibandingkan bak penampungan.
4. Tidak adanya Studi Kelayakan pembangunan yang menyebabkan munculnya dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat.
5. Pembangunan IPAL ini dalam implementasinya ada yang sedikit melenceng dari apa yang telah direncanakan

## B. Saran

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan kebijakan program pemerintah daerah yang mana khususnya Dinas PUPR pada sektor lingkungan. Agar kebijakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam rangka meningkatkan sanitasi lebih efektif dan berdampak besar pada masyarakat maka diperlukan untuk :

1. Terkait perencanaan pembangunan sebaiknya dalam perencanaan pembangunan yang berskala besar pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlunya melibatkan unsur masyarakat sehingga mendapatkan input dari sudut pandang masyarakat.
2. Terkait pelaksanaan pembangunan pemerintah perlu lebih berkoordinasi dengan masyarakat sekaligus sebagai upaya check and balances dalam proses .
3. Serta tiadakannya Studi atau Kajian kelayakan pembangunan di setiap proyek pembangunan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Puspita Sari dan Adhi Yuniarto. (2016). Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Agar-agar. *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 5, No. 2, ISSN: 2337-3539 (2301-9271)
- Aryantie, M. H., & Purwati, S. U. (2021). Analisis kebijakan sistem pengolahan air limbah rumah tangga Kota Depok. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(2), 172-185. doi:10.14710/jwl.9.2.172-185.
- Benyamin Sugeha. (2009). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT BERBASIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERIA EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP BAHAYA DAN RISIKO. *J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN*, Vol. 16, No.1, Maret 2009:65-74
- DHAMA SUSANTHI, MOH. YANUAR J. PURWANTO, SUPRIHATIN. (2018). Evaluasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan IPAL Komunal di Kota Bogor. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 19, No 2.
- DIAN FIRDAUS. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara). Skripsi FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
- Ervin Abd. Rahman & Tety Thalib. (2018). EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL (IPAL KOMUNAL) DI DESA MOLINGKAPOTO SELATAN KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA. PUBLIK: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* Volume V Nomor 2

FATUR RAHMAN KASIM. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DI KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR. Skripsi PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

I Gusti Nyoman Sudiarsa, I Nyoman Sujaya, I Wayan Jana. (2014). Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dengan Kondisi IPAL Komunal di Dusun Abuan Kauh Desa Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 4 no 1, 88-92

Khofifah Nur Illahi dan Suci Megawati. (2022). EVALUASI PROGRAM INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT DI RT 06 KELURAHAN KROMAN, KECAMATAN GRESIK, KABUPATEN GRESIK. *Publika*. Volume 10 Nomor 4, 1215-1226

Nada Quraini<sup>\*</sup>, Muhammad Busyairi, Fahrizal Adnan. (2022). EVALUASI KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL BERBASIS MASYARAKAT KELURAHAN MASJID SAMARINDA SEBERANG. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, vol. 6, no. 1, 2022

Purnawan, Paramita Dwi Sukmawati, Yerrsy Cherya Puspita. (2019). PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DOMESTIK (GREY WATER) DI UPT RUSUNAWA GRAHA BINA HARAPAN, KOTA YOGYAKARTA, DIY. *Jurnal Teknologi*, Volume 12 Nomor 2, 130-136

Ridwan Hafidh, Fibriliana Kartika, Aulia Ulfah Farahdiba. (2016). Keberlanjutan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (Ipal) Berbasis Masyarakat, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* Volume 8, Nomor 1, Hal. 46-55 p-ISSN:2085-1227 dan e-ISSN:2502-6119

Ridwan Hafidh, Fibriliana Kartika, Aulia Ulfah Farahdiba. (2016). Keberlanjutan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (Ipal) Berbasis Masyarakat, Gunung Kidul,

Yogyakarta. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 8, Nomor 1, Hal. 46-55 p-ISSN:2085-1227 dan e-ISSN:2502-6119

Satmoko Yudo dan Nusa Idaman Said. (2017). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI INDONESIA. Jrl vol 10 no 2 hal 57-75

Sentot Sugiyono. (2014). KAJIAN STUDY KELEMBAGAAN KEBIJAKAN SERTA OPERASIONAL PENGOLAHAN IPAL (INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH) JALAN JELAWAT KOTA SAMARINDA. EXTRAPOLASI Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya Vol. 7 No. 2, hal. 159 - 168

Wibowo, D., Wirawan, I., Rosdiana, R., Ilham I. (2022). Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah: Studi Kasus Rumah Sakit Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan, 22(02) 2021, 12-22 .doi: <https://doi.org/10.21009/PLPB.222.02>

## DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara	Narasumber
 A photograph showing three men sitting around a dark wooden table in an office. The man on the left is wearing a plaid shirt and a black t-shirt. The man in the middle is wearing a purple patterned shirt. The man on the right is wearing a blue and white patterned batik shirt. They are all looking towards the camera. In the background, there is a reception desk with a sign that says 'UPRKP KABUPATEN GUNUNGKIDUL'. There are also bookshelves and a Garuda emblem on the wall.	<p>Sekretaris Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul dan Ka. Bidang Cipta Karya DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul</p>
 A photograph of two men standing outdoors. The man on the left is wearing a bright blue jacket over a black t-shirt. The man on the right is wearing a yellow and green patterned batik shirt. They are both smiling. In the background, there is a blue car parked under a green structure with a pillar. There are trees and a building in the distance.	<p>Petugas/apparat IPAL Rusunawa Karangrejek</p>





Lurah Kalurahan  
Karangrejek



Dukuh Padukuhan  
Karangduwet 1



Ketua RW 06  
Karangduwet 1



Ketua RT 14  
Karangduwet 1



Ketua RT 15  
Karangduwet 1



Juminem  
(Masyarakat)





Mardi  
(Masyarakat),  
Dicko  
(Masyarakat),  
Dukuh  
Karangduwet !,  
dan  
Bhabinkamthipmas  
Karangrejek

**Dokumentasi Tindak Lanjut Laporan dan Keluhan Masyarakat Kepada UPT PALM dan Rusunawa**



## LAMPIRAN

# Pedoman Wawancara 1

- Subjek Penelitian :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul
  2. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum dan Rumah Susun DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul

Pertanyaan :

1. Bagaimana struktur organisasi di Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar bagian?
3. Bagaimana hasil dengan adanya IPAL di Rusunawa Karangrejek?
4. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait pembangunan IPAL di Rusunawa Karangrejek yang kemudian difasilitasi kepada masyarakat sekitar Rusunawa Karangrejek?
5. Bagaimana cara Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat ? Siapasaja yang terlibat?
6. Berapa jumlah SDM/pegawai yang mengurus IPAL Rusunawa Karangrejek? Dan apakah cukup?
7. Apakah terdapat pelatihan dalam peningkatan SDM?
8. Bagaimana dengan sarana penunjang pengelolaan air limbah domestic?
9. Darimana sumber dana pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
10. Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
11. Apa tujuan dari dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
12. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan pengelolaan limbah di IPAL Rusunawa Karangrejek?
13. Apakah terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah di IPAL Rusunawa Karangrejek?
14. Bagaimana pemerintah mengakomodasi keluhan dari masyarakat sekitar IPAL Rusunawa Karangrejek?

## Pedoman Wawancara 2

Pertanyaan :

Subjek : Aparat atau petugas yang mengurus dan merawat Instalasi  
Penelitian Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kalurahan Karangrejek,  
Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

1. Bagaimana struktur organisasi di UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum dan Rumah Susun DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar bagian?
3. Bagaimana SOP dalam pengelolaan limbah domestic di Rusunawa Karangrejek?
4. Bagaimana cara Dinas PUPRKP Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat ? Siapasaja yang terlibat?
5. Apakah terdapat hambatan, dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
6. Berapa jumlah SDM/pegawai yang mengurus IPAL Rusunawa Karangrejek? Dan apakah cukup?
7. Apakah terdapat pelatihan dalam peningkatan SDM?
8. Apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan IPAL Rusunawa Karangrejek?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
10. Apakah ada keluhan dari masyarakat setelah dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
11. Bagaimana pemerintah mengakomodasi keluhan dari masyarakat sekitar IPAL Rusunawa Karangrejek?

## **Pedoman Wawancara 3**

Subjek Penelitian : Lurah Kalurahan Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul

Pertanyaan :

1. Dimana posisi pemerintah kalurahan karangrejek dalam pengelolaan IPAL Rusunawa Karangrejek?
2. Bagaimana pemerintah kabupaten gunungkidul dalam merumuskan kebijakan pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
3. Bagaimana sosialisasi Pemerintah Kabupaten gunung kidul sebelum proses pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
4. Apakah dengan adanya IPAL Rusunawa Karangrejek menyelesaikan permasalahan sanitasi limbah di kalurahan karangrejek?
5. Apa dampak yang ditimbulkan setelah di bangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
6. Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?



## Pedoman Wawancara 4

Pertanyaan :

- Subjek : 1. Dukuh Padukuhan Karangduwet 1, Karangrejek  
Penelitian : 2. Ketua RW 06, Karangduwet 1, Karangrejek  
3. Ketua RT 14, Karangduwet 1, Karangrejek  
4. Ketua RT 15, Karangduwet 1, Karangrejek
1. Bagaimana sosialisasi pemerintah kabupaten gunungkidul sebelum dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
  2. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten gunungkidul mensosialisasikan tentang sanitasi limbah dan IPAL Rusunawa Karangrejek?
  3. Apakah dengan dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek menyelesaikan masalah sanitasi dan air limbah di daerah ....?
  4. Berapa KK atau rumah di daerah .... Yang menerima fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek?
  5. Bagaimana respon masyarakat mengenai pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?

## **Pedoman Wawancara 5**

Subjek Penelitian : Masyarakat Penerima Fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek

Pertanyaan :

1. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam mensosialisasikan kebijakan pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
2. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam mensosialisasikan tentang sanitasi dan air limbah setelah dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
3. Apa syarat yang diperlukan untuk mendapatkan fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek?
4. Apa dampak yang dirasakan masyarakat setelah terbangunnya fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek?
5. Bagaimana respon pengelola IPAL Rusunawa dalam menanggapi saran atau keluhan masyarakat?

## **Pedoman Wawancara 6**

Subjek Penelitian : Masyarakat Sekitar Bak Penampungan IPAL Rusunawa Karangrejek

Pertanyaan :

1. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam mensosialisasikan kebijakan pembangunan IPAL Rusunawa Karangrejek?
2. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam mensosialisasikan tentang sanitasi dan air limbah setelah dibangunnya IPAL Rusunawa Karangrejek?
3. Apa dampak yang dirasakan masyarakat setelah terbangunnya fasilitas IPAL Rusunawa Karangrejek?
4. Apakah dengan adanya bak penampungan IPAL Rusunawa Karangrejek di sekitar saudara mengganggu kegiatan sehari-hari?
5. Apakah dengan adanya bak penampungan IPAL Rusunawa Karangrejek berpengaruh terhadap kondisi pencemaran disekitar saudara?
6. Bagaimana respon pengelola IPAL Rusunawa dalam menanggapi saran atau keluhan masyarakat?



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B  
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 460/I/T/2022

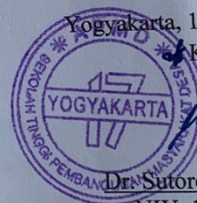
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : David Rahmad Mulyana  
Nomor Mahasiswa : 19520002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari,  
Kabupaten Gunungkidul  
b. Sasaran : Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air  
Limbah (IPAL )  
( Studi kasus Kalurahan Karangrejek, Kapanewon  
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul )  
c. Waktu : 14 Desember 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Ketua



*Dr. Sutoro Eko Yunanto*  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 165/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

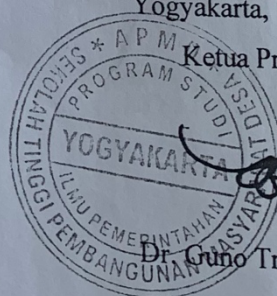
Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : David Rahmad Mulyana  
No. Mahasiswa : 19520002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022  
Judul Proposal : Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah  
Desa (IPALD) Di Kalurahan Karangrejek, Kapanewon  
Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 781/I/U/2022  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul  
Di Tempat

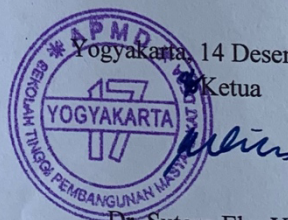
Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 14 Desember 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : David Rahmad Mulyana  
No Mhs : 19520002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )  
( Studi kasus Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari,  
Kabupaten Gunungkidul )  
Tempat : Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten  
Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Dr.Gono Tri Tjahjoko, M.A

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 14 Desember 2022

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190